birokrasi patrimonial. Patriomonialisme yang dimaksud adalah sistem pemerintahan yang memberikan hak kepada pemimpin untuk menganggap negara sebagai miliknya dan bisa diwariskan kepada keluarganya (turun-temurun), sementara rakyat dipandang sebagai bawahan yang berada di bawah perlindungan dan dukungannya. Dalam konsep ini, kekuasaan bersifat mutlak dan tidak bisa diintervensi oleh pihak lain, seorang kepala negara mempunyai kekuasaan untuk mengatur urusan ekonomi demi kebahagiaan rakyantnya.[70]

Untuk medapatkan legitimasi dari rakyat, Bani Umayyah mendasarkan pada ikatan persaudaraan mereka dengan'Uthman, kemudian menyatakan bahwa diri mereka sebagai keturunan pilihan Tuhan. Mereka juga mengadopsi sistem kerajaan dari negara Persia yang menggunakan sistem monarkhi, dengan retorika monarkhi ala Timur Tengah yang memandang bahwa penguasa adalah penggembala (*ra'y*) dan rakyat adalah gembalaan (*ra'iyyah*). Sang khalifah meliputi bumi dengan cahaya kasih sayang, keadilan dan hujan. Kemurahan ini wajib dibalas oleh rakyat dengan ketaatan tanpa syarat. Selain itu, mereka mulai menggunakan pemikiran Islam untuk mendukung otoritas penguasa, dengan menyebut diri mereka sebagai wakil Tuhan, sekaligus penerus nabi.[71]

Sikap *amoral*, berfoya-foya dan mengabaikan kesejahteraan rakyat yang dipertontonkan oleh para khalifah Bani Umayyah menambah kebencian di kalangan masyarakat. Akibatnya timbullah usaha-usaha untuk mengambil alih kekuasaan dari Bani Umayyah banyak digencarkan oleh sebagian kelompok, dan salah satu gerakan itu lahir dari keluarga Bani Hasyim, mereka beralasan bahwa

[70] Antony Black, *Pemikiran Politik Islam Dari Masa Nabi Hingga Kini,* 50-51.
[71] Ibid., 51.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kekhalifahan sebagai jabatan pengganti Nabi haruslah dikembalikan kepada keluarga Nabi.[72] Suksesi dan kudeta kepada kekuasaan Bani Umayyah mulai dilakukan, dimulai dengan diusirnya Yazid bin 'Umar bin Habairah ke Wasit dan berakhir dengan terbunuhnya Marwan bin Muhammad khalifah terakhir Bani Umayyah di Busir oleh pasukan 'Abbasiyah di bawah pimpinan Salih bin Ali, seorang paman Abu al 'Abbas yang lain.[73] Dengan terbunuhnya Marwān bin Muhammad, tumbanglah kekuasaan Bani Umayyah dan berdirilah kekuasaan Bani 'Abbasiyyah di bawah pimpinan khalifahnya yang pertama yaitu Abul 'Abbas Ash-Shafah dengan pusat kekuasaan pada awalnya berada di Kuffah yang di kemudian hari dipindahkan ke Baghdad.

Sama halnya dengan dinasti Bani Umayyah, Bani 'Abbasiyyah adalah menerapkan sistem patrimonial. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan mengadopsi pola administrasi Persia. Secara teori kepala negara adalah seorang khalifah yang memegang semua kekuasaan, ia dapat, dan telah melimpahkan otoritas sipilnya kepada seorang wazir, otoritas pengadilan kepada seorang hakim (*qadi*), dan otoritas militer kepada seorang jendral (*amir*), tapi khalifah sendiri dalam tetap menjadi pengambil keputusan akhir dalam semua urusan pemerintahan.[74]

Berdirinya daulah Bani 'Abbasiyyah, telah mengakhiri daulat Bani Umayyah yang menekankan landasan politiknya pada Arabisme. Pemerintahan

---

[72] Taufiqurrahman, *Sejarah Sosial Politik Masyarakat Islam.* (Surabaya : Pustaka Islamika, 2003), 106.
[73] Samsul Munir Amin, *Sejarah Peradaban Islam,* (Jakarta: Amzah, 2013), 139-140.
[74] Philip K. Hitty, terj. R. Cecep Lukman Yasin dan Dedi Slamet Riyadi, *History of The Arabs,* 395.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

daulat Bani ‘Abbasiyyah lebih mendasarkan kebijakan politiknya pada prinsip universalitas Islam. Prinsip pemerintahan yang inklusif transparan, rasional, prinsip pembaharuan ekonomi, dan prinsip mendorong berkembangnya ilmu pengetahuan.[75] Hitti menambahkan, bahwa perbedaan mendasar antara Dinasti Umayyah dan Dinasti ‘Abbasiyyah adalah Dinasti Umayyah terdiri atas orang Arab, sementara Dinasti ‘Abbasiyyah merupakan kerajaan orang Islam baru, tempat orang Arab hanya menjadi salah satu unsur dari berbagai bangsa yang membentuk kerajaan itu.[76]

D. Teori Relasi Agama Dan Negara

Transformasi pemikiran umat Islam tentang relasi agama dan negara dari waktu ke waktu bersifat temporal dan tentatif. Pada masa klasik dan pertengahan Islam, para sarjana muslim berpendapat bahwa relasi agama dan negara bersifat harmonis, tidak ada pertentangan antara negara dan agama. Doktrin Islam adalah negara sekaligus agama (*dīn wa dawlah*) menjadi sumber inspirasi bagi terbentuknya administrasi ketatanegaraan pada masa itu. Para khalifah juga tidak segan untuk mengatakan bahwa dirinya adalah wakil Tuhan dan penerus Nabi dalam menyebarkan ajaran Islam, di satu sisi dia adalah kepala negara yang mengatur kehidupan dunia, di sisi lain dia seorang imam yang tidak beda dengan imam sholat.

Di masa modern Islam pemikiran relasi agama dan negara tidak lagi tunggal, imperialisme dan kolonialisme Barat terhadap dunia muslim

---

[75] Samsul Munir Amin, *Sejarah Peradaban Islam,* 110.
[76] Philip K. Hitty, terj. R. Cecep Lukman Yasin dan Dedi Slamet Riyadi, *History of The Arabs,* 359.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memberikan warna baru kepada para pemikir muslim dalam memandang relasi tersebut. Negara-negara Barat pada masa itu secara tegas telah memisahkan negara dari agama. Sehingga agama hanya menjadi wilayah privat dan tidak boleh masuk ke dalam ranah publik, apalagi mencampuri urusan negara. Pemikiran seperti ini banyak diadopsi oleh sarjana muslim modern, dengan berasumsi bahwa, hanya dengan meniru pemikiran ala Barat termasuk dalam bernegara, umat Islam dapat mencapai kemajuan seperti yang diraih oleh Barat.

Terdapat tiga aliran dalam diskursus relasi agama dan negara dalam kalangan umat Islam. *Pertama,* tipologi organik integralistik, aliran ini berpendapat bahwa Islam adalah agama yang sempurna dan mencakup semua urusan, dunia dan akhirat, termasuk sistem ketatanegaraan dengan merujuk kepada kehidupan pada masa rasulullah dan khulafa' al-rashidun. *Kedua,* tipologi sekular, aliran ini merupakan paradoks dari aliran yang pertama. Pengikut aliran ini berpendapat bahwa tidak ada hubungannya antara agama dan negara, dengan beralasan bahwa Muhammad diutus dengan membawa risalah kenabian dan tidak disuruh untuk mendirikan sebuah negara. *Ketiga,* tipologi moderat, aliran ini merupakan sintesis dari kedua aliran di atas. Mereka menolak bahwa Islam adalah agama yang serba lengkap tetapi juga menolak bahwa tidak ada dalam Islam ajaran-ajaran tentang ketatanegaraan.[77]

1. **Tipologi Organik Integralistik**

Pandangan ini berpendapat integralistik agama dan negara, dengan alasan bahwa Islam adalah agama yang lengkap dan paripurna, baik dalam mengatur

[77] Jubair Situmorang, *Model Pemikiran Dan Penelitian Politik Islam,* 47.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

urusan agama maupun masyarakat. Paham ini menjelaskan bahwa agama tidak bisa dipisahkan dari negara, begitupun negara juga tidak bisa dipisahkan dari agama. Islam bukan agama yang hanya mengatur kehidupan spiritual umat Islam, tapi lebih dari itu, Islam adalah jalan hidup (*way of life*) bai umat Islam.

Tipologi ini merujuk kepada pemerintahan dan sistem politik yang dipraktekkan pada masa Rasulullah dan Khulafa al-Rashidun sebagai pondasi dasar terbentuknya pemerintahan dan negara Islam. Aliran ini pun juga terbagi menjadi dua bagian, tradisionalis dan fundamentalis. Kaum tradisionalis menginginkan berdirinya sebuah negara dengan sistem pemerintahan yang pernah dipraktekkan pada masa Nabi Muhammad dan Khulafa' al-Rashidun tanpa perubahan. Sedangkan kaum fundamentalis menginginkan reformasi sistem sosial, sistem pemerintahan dan negara untuk kembali kepada konsep Islam secara total dan menolak konsep lainnya.[78] Kedua aliran hanya berbeda dalam masalah sudut pandang, dengan tujuan yang sama, terbentuknya sebuah negara Islam yang mengatur seluruh aspek negara.

M. Nasir menganalogikan agama dan negara seperti dua sisi mata uang yang tidak bisa dilepaskan dan dipisahkan, oleh karena itu, Islam dan negara saling berkaitan dan apabila terjadi perbedaan antara keduanya adalah karena pengaruh Barat. Ajaran Islam dalam pandangan Nasir meliputi dua aspek, agama

[78] Edward Bot, "Islam dan Negara menurut Sa'id al-Asmawi" Suara Muhammadiyah, 1-15 Desember 2008, 30.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan masyarakat politik.[79] Urusan kenegaraan pada pokoknya merupakan bagian integral risalah Islam.

Munawir Sadzali menjelaskan bahwa pengaruh aliran ini pada umumnya berpendirian bahwa Islam merupakan agama yang serba lengkap dalam mengurusi tata kehidupan bernegara dan berpolitik. Dengan alasan ini, maka sudah seharusnya bagi umat Islam untuk kembali kepada ajaran Rasulullah dan empat sahabatnya dalam membangun tata kelola negara.[80] Pengusung aliran ini berpendapat bahwa agama dan negara harus digabung dalam satu atap dan tidak teepisahkan, dengan melihat bahwa Muhammad adalah seorang agamawan dan negarawan.

2. Tipologi Sekular

Aliran menekankan pada pemisahan antara agama dan negara, teori ini menyatakan bahwa agama tidak menekankan adanya kewajiban mendirikan sebuah negara. Teori ini menyatakan bahwa agama tidak menekankan adanya kewajiban mendirikan negara, dengan argument bahwa tidak ada ayat yang secara tegas mewajibkan pembentukan pemerintah dan negara. Aliran ini menegaskan bahwa pendirian sebuah lembaga negara bukanlah menjadi tugas yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad. Beliau hanyalah rasul yang ditugaskan untuk menyampaikan dakwah agama bukan membentuk negara.[81]

---

[79] Bahtiar Effendy, *Jalan Tengah Politik Islam: Kaitan Islam, Demokrasi dan Negara Yang Tidak Mudah* (Jakarta: Ushul Press, 2005), 8.
[80] Munawir Sjadzali, *Islam Dan Tata Negara,*1.
[81] 'Ali 'Abd al-Raziq, *Al-Islam wa Usul al-Hukm Bahs fi al-Khilafah wa al-Hukamah fi al-Islam,* (Kairo: Matba'ah al-Musyarakah, 1925), 64-65.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kelompok ini juga menandaskan, bahwa gagasan tentang negara Islam, bukan saja tidak mungkin secara konseptual tetapi juga tidak bisa dilaksanakan secara praktis. Permasalahan yang akan mucul adalah; siapakah yang memiliki otoritas untuk menentukan ke-Islam-an suatu negara dan menurut kriteria yang mana. Salah satu negara yang menerapkan teori ini adalah Turki yang diproklamirkan oleh Mustafa Kemal Attaturk.[82] Berabad-abad Turki adalah sebuah negara Islam ideal yang kemudian dirombak oleh Kemal menjadi negara sekular.

3. Tipologi Moderat

Aliran ini adalah sintesa dari kedua aliran, kelompok ini menolak bahwa Islam adalah agama yang serbalengkap dan dalam Islam terdapat sistem ketatanegaraan. Tetapi aliran ini juga menolak bahwa Islam adalah agama yang hanya mengatur hubungan antara manusia dengan Penciptanya.[83] Kelompok ini menyadari bahwa Islam mempunyai ajaran etika bernegara dengan prinsip-prinsipnya antara lain *al-ḥuriyyah* (kebebasan) dan kemerdekaan, *al-musawwa* (persamaan), *al-'adālah* (keadalian), *al-shura* (musyawarah) dan *al-tasāmuḥ* (toleransi).[84]

Dalam bidang politik, kelompok ini pada dasarnya merefleksikan upaya yang signifikan terhadap pemikiran dan orientasi politik yang menekankan

---

[82] Harun Nasution, *Pembaruan Dalam Islam, Sejarah Pemikiran dan Gerakan,* (Jakarta: Bulan Bintang, 1973), 142.
[83] Jubair Situmorang, *Model Pemikiran Dan Penelitian Politik Islam,* 47.
[84] Abd. Salam Arif, "Relasi Agama dan Negara Dalam Prespektif Islam", *Hermenia,* Jurnal Kajian Islam, Vol. 2, No. 2, (Juli-Desember, 2003), 282-283.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

manifestasi substansial dan nilai-nilai Islam dalam aktifitas politik.[85] Dalam hal ini, negara tidak perlu menelusup masuk ke dalam hubungan antara manusia dan tuhannya, dengan kata lain, negara tidak berhak untuk mengintervensi kehidupan seseorang. Tugas negara adalah sebagai penjaga perdamaian, persatuan bangsa dan mengupayakan kesejahteraan dan kenyamanan warganya. Kelompok ini lebih mementingkan subtansi ajaran Islam dari pada bentuk formalisasi Islam.

[85] M. Syafi'I Anwar, *Pemikiran dan Aksi Islam di Indonesia : Sebuah Kajian Tentang Cendikiawan Muslim Orde Baru* (Jakarta: Paramadina, 1995), 155.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id